



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : DINAS PERKEBUNAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUSRIZAL
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 488396

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 405 m2/120 m2 di KOTA JAMBI ,
HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 18846 m2 di MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
3. Tanah Seluas 480 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
4. Tanah Seluas 477 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 455 m2/247 m2 di KOTA JAMBI ,
HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
6. Tanah Seluas 400 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 217.000.000

1. MOBIL, HONDA MINI BUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR 108CC Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI MINI BUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
75.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR PANTHOM 200CC Tahun
2003, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	214.917.836
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.140.917.836
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.140.917.836

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.